

PENERAPAN KEBIJAKAN PPKM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA JAYAPURA

June Trivelline

Krey NPP.

29.1774

*Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua
Program Studi Politik Indonesia
Terapan*

Email: kreyjune13@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Restrictions on the Implementation of Community Activities, abbreviated as PPKM, is a policy made to prevent, reduce, and break the chain of prevention of Corona Virus Disease (Covid)19. The author focuses on the problem that there is a fairly large loss impact on income micro and small business actors in Indonesia when the PPKM was held during the Covid-19 pandemic. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the impact of restrictions on the implementation of community activities (PPKM) on the income of micro and small business actors in Jayapura City. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of policy theory by Edward III. Data collection techniques using in-depth interviews (9 informants), documentation and observation. Results/Findings: The findings obtained by the authors in this study are that the impact caused by PPKM on the income of micro and small business actors in Jayapura City is that the economy is very disrupted because it is limited by space and time that is increasingly narrow, resulting in income from business actors decreasing or decreasing. In addition, for business actors who have loans (credit) at the Bank, they cannot complete their loans on time or according to the specified time due to the PPKM policy that is currently happening in Jayapura City. **Conclusion:** The impact of PPKM on the income of micro and small business actors in Jayapura City has been carried out well, because the people of Jayapura City and also business actors obey and follow the policies that have been made and set by the government to be implemented with the aim of reducing and breaking the chain of spread of Covid-19 in the city of Jayapura. Although the implementation of the PPKM policy has had a positive impact on the government in reducing and breaking the chain of spread of Covid-19 in Jayapura City. However, with the implementation of this PPKM policy, it also has a negative impact on the community, especially for business actors because their income is reduced from their previous income.

Keywords: Impact, Policy, PPKM

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat yang disingkat dengan PPKM adalah kebijakan yang dibuat untuk mencegah, mengurangi, dan

memutuskan rantai penyebaran pencegahan Corona Virus Disease (Covid)19. Penulis berfokus pada permasalahan terdapat dampak kerugian yang cukup besar terhadap pendapatan pelaku usaha mikro kecil di Indonesia ketika diadakannya PPKM di masa Panedmi Covid-19 ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dampak dari adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kebijakan oleh Edward III. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (9 informan), dokumentasi dan observasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Dampak yang disebabkan oleh PPKM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura adalah ekonomi sangat terganggu karena dibatasi ruang gerak dan waktu yang semakin sempit sehingga mengakibatkan pendapatan dari pelaku usaha menurun ataupun berkurang. Selain itu, bagi pelaku usaha yang mempunyai pinjaman (kredit) di Bank tidak dapat menyelesaikan pinjamannya tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang ditentukan yang disebabkan karena adanya kebijakan PPKM yang sedang terjadi di Kota Jayapura. **Kesimpulan:** Dampak PPKM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura sudah terlaksana dengan baik, karena masyarakat Kota Jayapura dan juga pelaku usaha mentaati dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Meskipun penerapan kebijakan PPKM itu membawa dampak positif bagi pemerintah dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Namun dengan adanya penerapan kebijakan PPKM ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi para pelaku usaha karena pendapatan mereka yang berkurang dari pendapatan yang sebelumnya.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, PPKM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan terjadi secara mengglobal. Corona Virus Disease 2019 yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan. Virus baru ini diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019, gagal menahan wabah itu di Wuhan dan menyebar di kota-kota lain di Provinsi Hubei ke bagian lain dari daratan Cina dan di seluruh dunia. Dalam menangani masyarakat dari wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini Pemerintah Kota Jayapura menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena jumlah kasus yang tercatat Covid-19 semakin bertambah, dengan menerapkan kebijakan PSBB ini kegiatan masyarakat di luar rumah dikurangi seperti beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring (terhubung melalui jejaring internet) contohnya sekolah, kuliah, dan bekerja dengan menggunakan zoom, geogle meet. Menurut Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Untuk menghindari dampak dari pandemi ini, pemerintah dengan ini bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan, dan bagi mereka yang ingin berpergian harus tetap menjaga jarak (Social Distancing) dan tetap mematuhi protokol kesehatan atau peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak, sehingga penyebaran Covid-19 ini bisa diminimalisir Oleh karena itu, untuk mengurangi proses penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona

Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Dan Papua. PPKM adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari untuk menahan lajunya penyebaran serta penularan Covid-19. PPKM ini diberlakukan di Indonesia Sejak awal tahun 2021. PPKM yang bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar ruangan dengan tujuan lain untuk menangani pandemi Covid- 19 di Indonesia. PPKM yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya yaitu Provinsi Papua. PPKM berlaku di Jayapura (Papua) sejak tanggal 2 Juli 2021 Pemerintah Kota Jayapura memperketat aktivitas warga Kota Jayapura dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi aktivitas warga Kota Jayapura pada pukul 08.00 WIT hingga pukul 20.00 WIT. Jika ada yang melanggar jam operasional yang sudah ada maka akan ditindak tegas oleh pihak yang berwenang PPKM ini berdampak pada pendapatan pelaku usaha mikro kecil di Indonesia terkhususnya di Kota Jayapura. Usaha Mikro dan Kecil adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi standar usaha mikro. Usaha mikro kecil yang terdiri dari warung makan, kios umum, dan kerajinan kreatif noken. Dengan tujuan dari program layanan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan komunitas yang terlibat serta pengelolaan usaha mikro kecil. Berbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencegah Pandemi Covid-19, seperti Lock Down, pembatasan aktivitas masyarakat diluar ruangan PSBB dan sekarang menjadi PPKM. Covid-19 ini bukan hanya berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat secara umum, melainkan juga berpengaruh aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus Corona ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus Corona, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus Corona. Terutama bagi kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan PPKM ini sering ditemukan ketidakadilan, khususnya di tempat usaha dan bagi pelaku usaha mikro kecil. Bagi pelaku usaha merasa bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan tindakan bagi yang melanggar aturan batas waktu untuk membuka tempat usaha mereka yang adalah salah satu bagian dalam PPKM.

12 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM yaitu Dampak dari adanya PPKM ini adalah ekonomi sangat terganggu terutama bagi pelaku usaha mikro kecil di Kota Jayapura. Karena dibatasi ruang gerak dan waktu yang semakin sempit sehingga pendapatan mereka menurun. Selain itu bagi pelaku usaha yang mempunyai pinjaman (kredit) di Bank tidak dapat menyelesaikan pinjamannya tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang ditentukan disebabkan karena PPKM yang sedang terjadi. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini berdampak negatif pada masyarakat terkhususnya bagi masyarakat yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil, karena pemerintah telah memberlakukan jam operasional di pusat perbelanjaan, mall, pasar dan sektor usaha mikro kecil lainnya, yang berarti jika mall, pasar, dan warung makan, dan kios kecil lainnya ditutup maka pendapatan mereka akan turun karena tidak ada pemasukan yang tetap untuk usaha mereka yang sedang dijalankan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

13 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan penerapan kebijakan PPKM dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil. Penelitian Muhammad Rizal

Tahun 2021 berjudul *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta*, menemukan bahwasannya pelaku bisnis coffee shop terdampak dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, terlihat dengan berkurangnya omset penjualan, distribusi bahan baku kopi yang terlambat. Penelitian dilakukan dengan bentuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan pelaku bisnis coffee shop terdampak dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, terlihat dengan berkurangnya omset penjualan, distribusi bahan baku kopi yang terlambat, dan beralihnya perilaku B2B bergeser ke business to customer dengan meningkatkan konversi dalam digital marketing. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Alvia Pratiwi Putri Tahun 2020 yang berjudul *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Desa Blado, Kabupaten Batang*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya dampak yang ditimbulkan akibat adanya Covid-19 terhadap pendapatan UMKM di Desa Blado. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang berjualan di sekitar Desa Blado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 ini adalah tingkat daya beli masyarakat menurun dan keadaan pasar menjadi sepi. Penelitian berikutnya yaitu dari Aldi Kurnia Wahyu Tahun 2020 yang berjudul *Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM Di Kota Surabaya*, yang berkesimpulan bahwasannya pelaksanaan jam operasional yang terbilang dalam pelaksanaan PPKM Mikro bagi UMKM masih kurang efektif, hal ini terlihat dari respon para pelaku UMKM yang sangat keberatan dengan pelaksanaan jam operasional yang mengakibatkan kerugian.

14 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis lebih meneliti bagaimana dampak PPKM di masa pandemi Covid-19 terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Jayapura. Berbeda dari Muhammad Rizal, Alvia Pratiwi Putri dan Aldi Kurnia Wahyu. Selain itu diharapkan dengan mengetahui dampak dari PPKM terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Jayapura membuat pemerintah harus lebih tanggap dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kerugian yang dialami akibat adanya PPKM ini cepat terlewati.

15 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) dan strategi apa yang harus dilakukan agar pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura dapat bertahan menghadapi situasi tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM dan Dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura ini. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, Kepala Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, Kepala Bidang UKM Kota

Jayapura, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Jayapura, Buruh Harian Lepas, Pedagang Harian, Pedagang Makanan Malam Hari dan Masyarakat yang Ekonominya Menengah ke Bawah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan kebijakan PPKM dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Jayapura menggunakan teori dari Edward III. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1 Komunikasi

Dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura pastinya pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha agar kebijakan yang dibuat dapat diterapkan di masyarakat dan tidak menimbulkan kesenjangan informasi antara petugas satgas Covid dan masyarakat. Fakta yang ditemukan di lapangan sangat baik karena masyarakat dan pelaku usaha mentaati dan menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan baik. Sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terjadi antara petugas satgas Covid dan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah berhasil menerapkan kebijakan PPKM di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura.

Karena komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya disini menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial di Kota Jayapura sangat mempengaruhi kebijakan PPKM yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan di tengah masyarakat karena pelaku usaha adalah tenaga kerja yang termasuk dalam sumber daya manusia. Untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan pastinya setiap jam-jam yang telah ditentukan dilaksanakan pengecekan di setiap kota hingga pinggiran Kota Jayapura untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang melanggar kebijakan tersebut ataupun melakukan penyimpangan lainnya yang bersifat melanggar. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengecekan di Kota Jayapura adalah menggunakan mobil ataupun motor patroli.

3.3 Disposisi

Disposisi yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jayapura adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura agar tetap dalam keadaan aman dan terhindar dari Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, sehingga tidak menyebar. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini adalah Walikota, Satgas Covid, Pelaku Usaha, dan Masyarakat membuat kebijakan PPKM di Kota Jayapura. Sehingga meskipun pemerintah membuat dan menerapkan kebijakan PPKM di Kota Jayapura masyarakat mampu menerima dan menerapkan kebijakan yang

dikeluarkan terutama bagi kalangan pelaku usaha. Walaupun dengan adanya kebijakan PPKM ini yang tentunya membuat pendapatan dari para pelaku usaha berkurang karena mata pencaharian mereka dibatasi dengan waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah Kota Jayapura dengan adanya kebijakan PPKM yang berlaku.

34 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi tentang Dampak Kebijakan PPKM terhadap pendapatan pelaku usaha di Kota Jayapura terbentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi yang terkait, yang mana struktur birokrasi adalah menerima dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga masyarakat dan pelaku usaha mampu menerapkan kebijakan PPKM di Kota Jayapura dengan baik. Di sini yang di maksud yaitu pemerintah dalam hal ini adalah Walikota, Petugas Satgas Covid, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, selaku pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di Kota Jayapura.

35 Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Rata-rata penurunan pendapatan usaha mikro di Kota Jayapura yang disebabkan karena adanya kebijakan penerapan kebijakan PPKM yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di masyarakat. Akan tetapi dengan adanya kebijakan PPKM ini juga mengakibatkan pendapatan dari pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura menurun dan bahkan sampai ada dari pelaku usaha yang gulung tikar (bangkrut). Misalkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memulai usahanya di malam hari seperti nasi kuning, nasi goreng, martabak, roti bakar, pisang lumpur, dll. Akan tetapi dengan adanya PPKM dengan pemberlakuan jam operasional pada pukul 08.00 – 20.00 yang masih sangat kurang efektif karena membuat pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura tidak dapat membuka usaha mereka karena dibatasi dengan jam operasional yang telah berlaku. Penurunan pendapatan pelaku usaha kecil rata-rata disebabkan karena kebijakan PPKM di Kota Jayapura yang memberlakukan jam operasional untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga membuat pengusaha mikro dan kecil membuka usahanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak seperti hari-hari sebelum adanya penerapan kebijakan PPKM yang tidak membatasi usaha mereka. Sehingga terjadi adanya perbedaan pendapatan antara sebelum dan setelah adanya PPKM. Karena jika ada masyarakat ataupun pengusaha mikro dan kecil yang melanggar kebijakan PPKM yang telah diberlakukan maka akan menerima sanksinya.

36 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan dari Penerapan Kebijakan PPKM Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Jayapura Dampak PPKM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura sudah terlaksana dengan baik, karena masyarakat Kota Jayapura dan juga pelaku usaha mentaati dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Meskipun penerapan kebijakan PPKM itu membawa dampak positif bagi pemerintah dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Namun dengan adanya penerapan kebijakan PPKM ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi para pelaku usaha karena pendapatan mereka yang berkurang dari pendapatan yang sebelumnya. Penerapan PPKM ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Muhammad Rizal (Muhammad Rizal 2021), namun kebijakan ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu hanya banyak masyarakat yang merasakan dampak negative dari diberlakukannya PPKM ini terkhusus pelaku usaha mikro dan kecil dimana pendapatan yang biasanya mereka dapat

menjadi berkurang bahkan tidak dapat sama sekali. Selain itu, penerapan PPKM dan dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil ini berbeda dari temuan Alvia Pratiwi Putri (Alvia Pratiwi Putri, 2020) yang lebih berfokus bagaimana cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk tetap bisa bertahan selama diberlakukannya PPKM di masa Pandemi Covid-19 ini. Penerapan kebijakan PPKM ini juga masih banyak kekurangan seperti pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura adalah ekonomi sangat terganggu karena dibatasi ruang gerak dan waktu yang semakin sempit sehingga mengakibatkan pendapatan dari pelaku usaha menurun ataupun berkurang. Selain itu, bagi pelaku usaha yang mempunyai pinjaman (kredit) di Bank tidak dapat menyelesaikan pinjamannya tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang ditentukan yang disebabkan karena adanya kebijakan PPKM yang sedang terjadi di Kota Jayapura. seperti temuan Aldi Kurnia Wahyu (Aldi Kurnia Wahyu, 2020).

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam penerapan kebijakan PPKM ini yaitu masyarakat mengalami dampak yang sangat besar terhadap diberlakukannya kebijakan tersebut karena terbatasnya ruang dan gerak sehingga sumber perekonomian dari masyarakat pun juga ikut terganggu, hal tersebut yang membuat pemerintah maupun masyarakat jadi ekstra sabar dan berusaha untuk tetap bisa menstabilkan perekonomian seperti dengan tetap membuka usahanya dengan mencari strategi pemasaran melalui digital marketing atau pemasaran online, berusaha mencari produk paling relevan dan laku saat pandemi Covid-19 atau peluang yang memungkinkan, mengatur jam kerja atau jam buka untuk menyesuaikan dengan aturan PPKM darurat, mencari supplier yang masih berada di daerah yang bisa dijangkau, mempersiapkan modal darurat yang tak terpakai untuk berjaga-jaga.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPKM dan Dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura sudah terlaksana dengan baik, karena masyarakat Kota Jayapura dan juga pelaku usaha mentaati dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Meskipun penerapan kebijakan PPKM itu membawa dampak positif bagi pemerintah dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura. Namun dengan adanya penerapan kebijakan PPKM ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi para pelaku usaha karena pendapatan mereka yang berkurang dari pendapatan yang sebelumnya. Sehingga pelaku usaha mikro dan kecil yang dibina langsung oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan guna meningkatkan pemahaman tentang kebijakan PPKM dan bagaimana caranya untuk tetap bertahan dan mengembangkan usahanya ditengah kebijakan PPKM tersebut. Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edwards III. Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM dan Dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jayapura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto., 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aldi, W.K., 2021 *penerapan+ppkm+terhadap+pendapatan*. Surabaya.
- Alvia, P.P., 2020 *analisis dampak covid-19 terhadap pendapatan umkm*. Batang.
- Bungin, B., 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswel, J.W., 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafizah, S.D., 2021 *Analisis tentang dampak covid-19 terhadap perekonomian usaha mikro kecil dan menengah*. Mataram.
- Indrawan, Y.R., 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refita Aditama.
- Meleong, L.J., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mamik., 2015 *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Muhammad, R., 2021 *dampak kebijakan ppkm bagi pelaku bisnis coffe shop pada masa pandemi*. Purwakarta.
- Oktiani, V., 2020 *apa yang dimaksud virus corona ini asal mula hingga gejala covid-19*. Yogyakarta.
- Sudaryono., 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono., 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tantang, A., 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



